

Ketidakefektifan G-20 Dalam Menyelesaikan Krisis Finansial Global 2008

Rusthon Arif

*Program Studi S2 Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan tentang ketidakefektifan dari G-20 dalam menyelesaikan persoalan krisis global pada tahun 2008 sehingga penulis kemudian mengangkatnya sebagai isu dalam penelitian, tepatnya tentang mengapa G-20 tidak dapat secara efektif membawa kerjasama multilateral dalam menyelesaikan krisis keuangan global. Berdasarkan analisis dari sejumlah data mengenai kinerja dari G-20 serta dampak yang ditimbulkan dari krisis keuangan, didapatkan jawaban pertama. Ketidakefektifan G-20 dalam menyelesaikan krisis keuangan tahun 2008 berkaitan dengan rezim penyangga utama yang ditetapkan di G-20 oleh pihak AS dalam kondisi krisis di mana kemudian tidak ada rezim finansial yang mampu bertanggung jawab dalam menjawab bahwa G-20 memiliki banyak masalah untuk mensinkronisasikan sistem keuangan global. Tidak adanya instrumen dalam mengimplementasikan Dewan Stabilitas Keuangan pun meninggalkan masalah tersendiri dalam penanganan krisis keuangan. Selain itu, munculnya kekuatan baru, dalam hal ini Cina, sebagai penyeimbang bagi dominasi AS dalam perekonomian sehingga dapat mengatur sistem keuangan internasional, menjadi sangat sulit.

Kata Kunci: *G-20, krisis keuangan, rezim internasional, rezim pendukung, pasar berkembang, free rider*

This study reveals the ineffectiveness of the G-20 in resolving the global crisis of 2008 then the authors raise the issue of the research that is why the G-20 did not effectively carry out multilateral cooperation in resolving the global financial crisis. Then, through the analysis of a variety of data about the performance of the G-20 and the effect of the financial crisis, earned first answer Ineffective G-20 in resolving the 2008 financial crisis due to the regime's main buffer G-20 that the United States in circumstances of crisis, then no regime financially responsible replied that the G-20 had a lot of problems to synchronize the global financial system. The absence of instruments in implementing the Financial Stability Board leave its own problems in the handling of the financial crisis. Besides, the emergence of new powers in this regard China as a counterweight to U.S. dominance in the economy so as to regulate the international financial system becomes very difficult.

Keywords: *G-20, the financial crisis, international regime, supporting regime , emerging market, free rider.*

The Group of Twenty atau Forum G-20 merupakan kelompok 19 negara plus Uni Eropa dengan perekonomian terbesar di dunia. Keanggotaan kelompok ini merupakan gabungan dari negara-negara maju G-8 dan kelompok representatif negara-negara berkembang yang pada dasarnya merupakan forum global untuk mendiskusikan isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga keberlangsungan stabilitas keuangan internasional. Adapun yang menarik dari pertemuan G-20 adalah kesepakatan menggulirkan kebijakan finansial demi mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya (Wolf 2008, 3-4). Isu finansial tersebut merupakan tema utama yang menjadi pokok pembahasan dalam program kerja G-20, isu-isu transnasional lain seputar pencucian uang, terorisme, regionalisme hingga bantuan kemanusiaan juga menjadi perhatian G-20 (Wolf 2008, 6).

G-20 mengalami tantangan ketika krisis finansial mulai dirasakan oleh banyak negara yang dipicu krisis dari AS dan mencuat di tingkat global pada tahun 2008. Kemunculan krisis itu sendiri telah mengundang pertanyaan tentang relevansi dan bahkan soal efektivitas G-20 di dalam sistem kapitalisme dan liberalisasi sektor finansial (BI t.t. dalam bi.go.id 2012). Fenomena lain, pada tingkat kerjasama internasional kita dapat melihat sendiri bahwa biasanya penanganan krisis global diatasi dan didominasi oleh kelompok-kelompok elite global, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) bersama negara-negara maju (Gelinas 2003).

Akan tetapi, hal yang unik dari krisis finansial 2008 ialah awal mula krisis berasal dari jantungnya kapitalisme global dengan *laissez-faire*nya itu, AS. Krisis global ini berawal pada negara adidaya AS dimana dimulai dari kredit macet perumahan di AS yang merupakan sentrum bagi perekonomian dunia. Krisis finansial ini akan menyebabkan resesi ekonomi di AS dan di berbagai negara di atas mulai akhir tahun 2008. IMF memperhitungkan bahwa kerugian di seluruh dunia pada hutang yang berasal dari AS mencapai 1,4 triliun US dolar pada bulan April 2008 (Hadi t.t., dalam didik2h.web.ugm.ac.id 2012).

Karena itulah, G-20 makin mengintensifkan pertemuan pada tingkat multilateral. Lembaga G-20 yang menguasai sekitar 80% perdagangan global dan 2/3 populasi dunia, duduk bersama dalam lima konferensi tingkat tinggi (*summit*) untuk mencari solusi bersama terkait krisis finansial global, yakni pada 15 November 2008 di Washington, AS pada 2 April 2009 di London, Inggris, di Pittsburgh, AS pada 25 September 2009, Toronto, Kanada Juni 2010, Seoul, Korea Selatan November 2010

(Brown tt, dalam guardian.co.uk dikases pada 11 Oktober 2012). Dalam hal stimulus fiskal para negara anggota G-20 sepakat menggulirkannya demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pelemahan perekonomian. Salah satu agenda dari beberapa agenda hasil pertemuan pertama G-20 di kota Washington tersebut adalah kesepakatan G-20 menggulirkan kebijakan fiskal demi mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya (Summit Pittsburg t.t. pittsburghsummit.gov.uk 2012).

Berbeda dengan pertemuan G-20 di kota Washington, pertemuan kedua KTT G-20 Di London (Summit London t.t. dalam londonsummit.gov.uk 2012) membentuk satuan tugas untuk mengatasi krisis keuangan global. Dalam KTT ini, para pemimpin sepakat mendorong kebijakan peningkatan pemasokan likuiditas dan penurunan rasio suku bunga untuk mengatasi krisis keuangan secara bersama-sama. Pada pertemuan ketiga G-20 di Pittsburgh AS, pemimpin G-20 mendorong ekonomi mereka sampai gejala pemulihan krisis finansial bisa terselesaikan (Pittsburg G-20 Partnership t.t. dalam G-20pittsburghsummit.org 2012).

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan G-20 di dalam menyelesaikan krisis global 2008 yang disebabkan oleh negara AS, efektifitas upaya penyelesaian G-20 masih dipertanyakan. Efek global dan dampak bisa dilihat pada pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor barang dan jasa. Penurunan ekspor berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pada akhirnya konsumsi berkurang dan pertumbuhan ekonomi terkoreksi, Bank Dunia dan ADB, memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi turun yakni 6,3% (dalam hharryazharazis.com diakses pada 23 Desember 2012). Dan dalam laporan tahunan "World Economic Outlook", IMF menilai bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih terlalu lemah untuk menekan tingginya tingkat pengangguran, inflasi dan sebagainya.

Kerangka Pemikiran

Konsep rezim internasional banyak mempengaruhi efektif dan tidak efektifnya sebuah kerjasama internasional. Keberadaan penyangga rezim internasional membuat peran organisasi internasional lebih signifikan. rezim berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa berbagai institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain) (Krasner 1982,

108). Para teoritis rezim menyatakan bahwa kerjasama tetap bisa terjadi walaupun dalam situasi anarki sekalipun. Definisi rezim yang paling lazim digunakan ialah definisi Stephen Krasner. Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat norma-norma, Peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang bersifat eksplisit maupun implisit dimana semua kepentingan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional. Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku negara. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar 'perjanjian sementara' (*temporary agreement*) yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam power atau interest (Jervis 2007, 317-349).

Kehadiran sebuah hegemon diperlukan karena aktor dominan dalam ekonomi dan politik internasional adalah penting untuk menciptakan standar global. G-20 membutuhkan negara yang mampu menjaga stabilitas kerjasamanya, kemudian dalam teorinya Gilpin mengatakan bahwa stabilitas hegemoni menegaskan pentingnya kehadiran suatu kekuatan dominan atau hegemon dalam ekonomi dunia yang terbuka dan liberal. Teori ini tidak mengatakan bahwa ekonomi internasional tidak akan dapat eksis dan berfungsi tanpa kehadiran hegemoni. Teori ini mengatakan bahwa tipe tertentu dari orde ekonomi internasional, dalam hal ini liberal, tidak dapat maju dan mencapai perkembangan penuh tanpa kehadiran suatu kekuatan hegemoni. Yang harus digarisbawahi di sini yakni bahwa teori ini tidak beranggapan bahwa struktur politik hegemoni menentukan kebijakan perdagangan atau transaksi ekonomi. Kebijakan perdagangan ditentukan oleh koalisi kepentingan domestik, sementara transaksi ekonomi ditentukan oleh variabel-variabel ekonomi. Dengan adanya kekuatan hegemoni (Gilpin 1987, 65-117).

Ketika negara-negara lain mungkin mendapatkan manfaat dari rezim. Hegemon akan menggunakan kekuatan mereka semaksimal mungkin untuk menciptakan rezim. Penarikan diri hegemon dari rezim akan membuat keefektifan rezim akan berkurang (Krasner 1982, 13). Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar negara. Rezim merupakan aktor independen dalam politik internasional. Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. ketidakefektifan agenda G-20 khususnya dalam penanganan krisis finansial global

terkait juga dengan negara penyokong G-20 sedang dalam keadaan krisis (Ilham 2011 dalam igj.or.id 2012).

Secara konkret, tindakan *collective actions* (Sandler & Arce 2002, 198) yang dilakukan oleh G-20 dalam menyelesaikan krisis finansial seperti yang sudah dilakukan atau dihasilkan selama pertemuan-pertemuan negara anggota G-20 agar bisa tercapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan krisis finansial AS segera terselesaikan. Tindakan *collective actions* G-20 dalam rangka penanganan krisis finansial tersebut menimbulkan masalah baru yakni munculnya *Free rider* (Sandler 2002, 98). Konsep *free rider* ini muncul karena akibat dari tindakan *collective action* G-20, semangat penyelesaian krisis finansial oleh organisasi internasional G-20 tidak diimbangi dengan semangat setiap anggota G-20 sebab setiap anggota G-20 mempunyai kepentingan nasional, yang kepentingan nasional tersebut bertentangan dengan program yang di agendakan oleh G-20. *Free rider* mendapat keuntungan akibat adanya perpindahan modal dari negara maju ke negara berkembang. *Free rider* memanfaatkan keadaan tersebut tanpa melakukan agenda yang sudah ditetapkan oleh G-20.

Dalam kondisi krisis global tersebut dapat dilihat suatu fakta bahwa hegemoni AS sedang mengalami penurunan dan dunia sedang berada dalam periode itu. Saat kekuatan terbesar ini surut, maka akan ada konfigurasi baru. Mengutip pernyataan Joseph P Quinlan yang menyatakan bahwa krisis global menandai akhir kejayaan AS dan terbentuknya konfigurasi baru yang masih mencari bentuk. Dalam kondisi ini juga negara *emerging market* (Jacques 2011, 408) juga diuntungkan seperti halnya negara China, China mendapat manfaat dengan adanya krisis finansial yang terjadi di AS.

Ketidakmampuan negara AS dalam menyangga perekonomian nasionalnya membuat negara AS tersebut menjual sebagian surat berharga yang dimiliki oleh negara AS, dan China sebagai pembeli sebagian surat berharga yang dimiliki oleh negara AS (Jacques 2011, 317). Pemanfaatan kondisi ini oleh negara *emerging market* menjadikan ketidak efektifan G-20 dalam penyelesaian krisis finansial sebab negara *emerging market* diuntungkan dengan kondisi tersebut.

Hasil Penelitian

Tabel 01
Tema Utama Program Kerja G-20 Periode 2004-2010

Major Theme Chair	2004 Germany	2005 China	2006 Australia	2007 S.Africa	2008 AS	2009 London	2010 Korea
Crisis prevention & Resolusi	-	X	X	X	X	X	X
Challenges of Globalization	X	X	X	X	-	X	-
Combating Terror Financing	X	X	X	X	-	-	-
Development & Aid	-	X	X	-	X	X	-
Financial Abuse / Financial Crime	-	-	X	X	X	-	X
Institution Building In Financial Sector	-	-	X	X	-	-	-
Demographics	-	-	-	X	X	X	-
Regional Economic Integration	-	-	-	X	-	-	-
Surveillance / Domestic Policies	-	-	-	X	X	X	X
BW 1 Reform	-	-	-	-	X	X	X
Commodities & Economic Impact	-	-	-	-	-	X	X
Fiscal Policies	-	-	-	-	-	-	X

Sumber: Martin Wolf, *Fixing Global Finance (Forum on Constructive Capitalism)* (paperback), Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2008, hlm. 3-4.

Dari tabel 1 kita bisa melihat fokus utama G-20 dalam kerja di tataran internasional adalah tentang penyelesaian krisis, kemudian diikuti dengan agenda pentingnya globalisasi dan tantangannya, pembangunan dan bantuan, serta integrasi ekonomi regional dan lain-lain. Kerjasama G-20 diharapkan mampu menangani krisis finansial 2008 karena negara anggota G-20 merupakan kumpulan-kumpulan negara yang 2/3 perekonomiannya menguasai dunia.

Komitmen-Komitmen Yang Disepakati Dalam G-20

Terdapat 93 komitmen yang telah dibuat pemimpin-pemimpin G-20 di KTT London, Washington, Pittsburgh, Toronto dan Seoul (*Progress report on the Economic and Financial Actions of the London, 2009*). Sembilan puluh tiga komitmen yang telah dibuat dalam tiga KTT pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut. Komitmen tersebut meliputi komitmen-komitmen dalam sektor (1) makro ekonomi, (2) *restoring lending*; (3) *TradeFinance*; (4) reformasi IFI; (5) *Energy and Climate Change*; (6)

Financial Regulation; (7) FSB Establishment; (8) International Cooperation; (9) Prudential Regulation; (10) Scope of Regulation; (11) Transparent Assessment of Regulatory Regimes; (12) Compensation; (13) Tax havens and Non-Cooperative Jurisdictions; (14) Accounting Standards; (15) Credit Rating Agencies.

Dalam makroekonomi, G-20 menyepakati 9 komitmen yang diantaranya meliputi (1) komitmen untuk menyediakan stimulus fiskal untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi (*"deliver the scale of sustained fiscal effort necessary to restore growth"*), (2) komitmen Bank Sentral untuk membuat kebijakan-kebijakan yang luwes sejauh diperlukan dan instrumen-instrumen moneter untuk menjaga stabilitas harga (3) resolusi untuk menjamin ketahanan fiskal dan stabilitas harga jangka panjang dan strategi-strategi untuk keluar dari krisis yang dapat dipertanggung jawabkan, (4) komitmen untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam kerangka *"Strong, Sustainable and Balanced Growth"*, (5) komitmen untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi dan menahan diri dari upaya devaluasi mata uang; (6) mendaya-gunakan investasi yang didanai program stimulus fiskal untuk tujuan membangun *"a resilient, sustainable and green recovery"* (pemulihan yang kokoh, berkelanjutan dan ramah lingkungan) dan (7) tanggung jawab kolektif untuk meminimalisasi dampak sosial krisis di negara-negara termiskin.

Pada sektor pemulihan pinjaman (*restoring lending*), pemimpin-pemimpin G-20 berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan aliran kredit melalui sistem finansial dan menjamin dampak positif lembaga-lembaga yang penting secara sistemik dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan kerangka yang telah disepakati dalam G-20 untuk memulihkan sistem peminjaman dan untuk memperbaiki sektor finansial. Dalam sektor keuangan perdagangan, G-20 bersepakat untuk menjamin ketersediaan sedikitnya USD 250bn dalam jangka waktu dua tahun untuk mendukung keuangan perdagangan melalui agen-agen kredit ekspor dan investasi dan melalui MDBs untuk jangka waktu tiga tahun.

Pada sektor ini juga disepakati fleksibilitas persaratan kapital bagi keuangan perdagangan. Dua puluh enam (26) komitmen menyangkut reformasi *Internasional Finansial Institutional* (IFI) juga disepakati dalam KTT G-20. Kedua puluh enam komitmen tersebut meliputi dari 6 komitmen tentang sumber-sumber IMF termasuk peningkatan dana, 10 tentang sumber-sumber Bank Dunia termasuk peningkatan kapital

untuk pinjaman, 1 komitmen bagi fleksibilitas "*Debt Sustainability Framework*" dan 10 komitmen terkait dengan tata kelola IMF dan Bank Dunia termasuk reformasi dalam lembaga keuangan internasional tersebut.

Dampak Globalisasi : Terjadi Krisis Finansial di Negara AS

Globalisasi adalah proses transformasi ekonomi dan struktural multidimensi, yang biasanya terkait dengan meningkatnya arus modal, barang, jasa dan *knowledge* melintasi batas negara. Serta timbulnya serangkaian struktur organisasi dan infrastruktur untuk mengakomodasi transaksi dan aktivitas ekonomi internasional tersebut (Pearson Educating Canada 2005 dalam wps.prenhall.com 2012). Globalisasi membuka kesempatan dan peluang bagi negara dengan pendapatan rendah dan menengah, melalui terbukanya akses ke pasar global, peningkatan arus *Foreign Direct Investment* (FDI), integrasi negara-negara ke dalam *global value chain* (GVC) (Gereffi & Stark 2011 dalam www.cggc.duke.edu diakses pada 23 Desember 2012) atau global production network (GPN), serta akselerasi transfer teknologi, baik teknologi proses dan produk. Meningkatnya saling ketergantungan antar negara mendorong tingginya kerentanan terhadap "kejutan" ekonomi global yang terjadi di luar kendali dari tiap-tiap negara (Basri & Rahardja 2010, 77-97).

Untuk kasus AS, krisis dipicu oleh gagal bayarannya (*default*) atas pinjaman yang *excessive* dan *imprudent* yang diberikan oleh, misalnya, Washington Mutual bagi banyak pembeli rumah (KPR) yang memiliki resiko tinggi di AS. Di dunia finansial modern, bank dapat menggunakan KPRnya sebagai jaminan atas surat utang yang dijualnya ke investor. Dalam kasus Washington Mutual, pinjaman perumahan ini lalu dibuatkan surat utang lalu dijual ke institusi penjamin kredit (Fannie Mae dan Freddie Mac) untuk mendapatkan dana tambahan. Selanjutnya, institusi penjamin tadi mengumpulkan hak tanggungan dan dibuatkan satu instrumen keuangan yang dinamakan *Mortgage Backed Securities* (MBS) dan dijual ke pasar saham Wall Street.

Kemudian, Wall Street melakukan re-package atas MBS ini ke dalam instrumen derivatif lainnya yang dinamakan *Collateralized Debt Obligation* (CDO) (Batra 2007 dalam planmanconsulting.com diakses pada 23 Desember 2012). Melalui mekanisme ini, bank tidak menghadapi risiko penunggakan hutang lagi, karena telah "menjual"

hutang tersebut ke investor. Bank bisa mengambil keuntungan dari selisih antara jumlah KPR yang diberikan ke debitor (misalnya US\$1 juta) dan harga CDO yang dijual ke investor (misalnya US\$1.02 juta). Investor tentu menerima bunga dari CDO yang dibelinya (misalnya 5.0% per tahun). Pada saat itu jumlah KPR di AS sekitar US\$ 10 trilliun dan sekitar US\$ 1.2 trilliun adalah KPR subprime (tidak prima). Dari US\$1,2 triliun KPR subprime, sekitar US\$460 miliar telah dijual dalam bentuk CDO ke investor di seluruh dunia. Pada awal tahun 2004, suku bunga dollar AS atau sering disebut Fed Funds Target Rate (FFTR) hanya 1%, sehingga pada debitor subprime masih mampu mencicil KPR. Krisis terjadi ketika bank sentral AS menaikkan FFTR dari 1% pada Mei 2004 menjadi 5.25% pada Juni 2006. Akibatnya para debitur subprime, yang pada umumnya memang berpenghasilan pas-pasan mulai mengalami gagal bayar dan menunggak KPR-nya dalam skala yang besar. Pada saat yang hampir bersamaan, harga sektor properti AS juga jatuh. Akibatnya, lembaga keuangan penyalur KPR banyak yang merugi, bahkan beberapa di antaranya gulung tikar.

Hilangnya Dominasi AS dan Munculnya Kekuatan Baru

Kemunculan negara-negara kekuatan baru dunia ini ikut mempengaruhi eksistensi AS dalam dunia internasional. Bahkan beberapa pihak beranggapan bahwa dominasi AS sudah tidak relevan lagi dengan posisi percaturan perpolitikan internasional di masa sekarang ini, dengan munculnya negara kekuatan baru dunia tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Samuel P. Huntington bahwa: Konfigurasi struktur power global pasca Perang Dingin ditandai dengan situasi *"the lonely superpower via a vis multiple powers"*, dimana AS sebagai satu-satunya negara superpower sepeninggal Uni Soviet berhadapan dengan *new emerging multiple power* (Uni Eropa, Rusia, China, dan Jepang) (Hermawan 2008, 12).

Besarnya dominasi AS dalam dunia internasional membuatnya sering disebut sebagai hegemon dunia. Namun pada tahun 2008, terjadi krisis finansial di AS, yang menyebabkan AS mengalami kemunduran dalam sektor perekonomian. Hal ini menjadi pemicu munculnya, bahwa dominasi AS mulai mengalami kemunduran. Pada sisi lain, muncul kekuatan baru lainnya, yaitu China, yang dianggap mampu menyaingi dominasi AS selama ini. Anggapan ini, didasarkan pada keberhasilan pembangunan dan kemajuan yang dicapai China. Fakta-fakta kemajuan



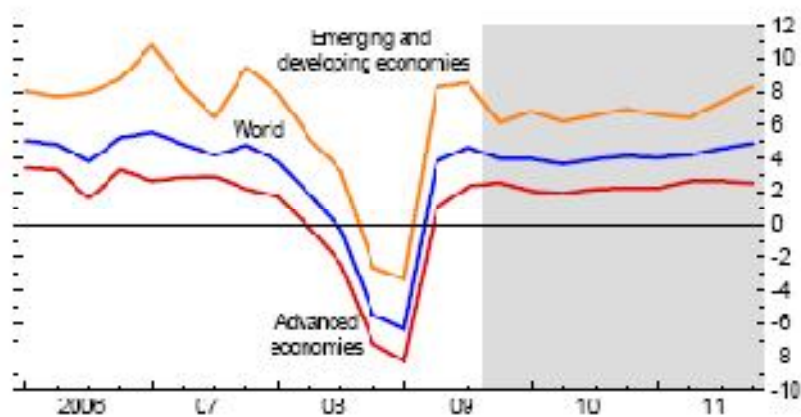
Sumber: imf.org 2012

China dalam dunia internasional dapat dilihat pada bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, kekayaan dan industrinya, serta pembangunan kekuatan militernya.

Di bidang ekonomi, masuknya China ke dalam WTO memberikan kepada China akses pasar yang lebih luas di dunia internasional. Masuknya China ke dalam WTO membuat China pada tahun 2001 tersebut semakin memperbesar jumlah ekspornya (Hermawan 2008, 2). Seiring dengan perkembangan pesat perekonomian China, keperkasaan AS di bidang ekonomi ternyata semakin surut. Krisis global yang bersumber dari kekacauan finansial di AS dilihat sebagai indikasi menurunnya leverage ekonomi AS di level global. Dalam hal ini, Jeffrey Sach menyatakan bahwa dominasi AS di dunia akan segera berakhir pada kuartal kedua abad ke-21.

Munculnya Negara *Emerging Market*

IMF Melalui *World Economic Outlook* (imf.org) menyatakan bahwa perekonomian dunia telah menunjukkan pergerakan yang positif selama 2009 dan terus positif pada 2010. Keyakinan pada sektor keuangan dan riil telah menunjukkan adanya perbaikan dan telah mendorong *recovery*. Berbagai indikator ekonomi dunia menunjukkan perkembangan. Konsumsi domestik yang mulai kembali positif menjadi penggerak ekonomi dunia, khususnya di *Emerging market*. Berbagai stimulus ekonomi merupakan faktor pendorong yang penting dalam membalikan siklus ekonomi. Ekonomi dunia tumbuh positif 3.9% pada 2010, naik 0.8% dari perkiraan WEO sebelumnya di bulan Oktober 2009. Perkembangan ini amat baik jika melihat terjadinya kontraksi ekonomi sebesar 0.8% selama 2009.



Sumber: imf.org 2012

Pertumbuhan ekonomi di *emerging countries* (EM) cukup tinggi mencapai 6% pada 2010 atau naik 0.9% dari perkiraan sebelumnya sebesar 5.1%. IMF menggaris-bawahi kondisi *stronger economic frameworks* dan pengambilan kebijakan yang tepat telah membantu *Emerging market* dalam mengatasi *unprecedented external shock* dan kembali menarik *capital flows*. WEO menyatakan bahwa *Emerging market* di kawasan Asia merupakan penggerak utama dalam *recovery* dunia, sementara negara-negara di kawasan Eropa menunjukkan *recovery rate* yang relatif lebih lambat. Negara-negara ini adalah produsen yang produk-produknya sudah mulai menguasai pasar dunia. Negara-negara ini adalah juga konsumen yang potensial, dan karenanya menjadi *global buyers* bagi produk-produk pasar global, termasuk produk negara-negara maju maupun negara berkembang (Briand *et al.* tt dalam who.int 23 Desember 2012).

China diuntungkan Sebagai Negara Emerging market

Krisis finansial global yang bermula di AS telah mengekspos kelemahan sistem kapitalisme AS yang bercorak Anglo-Saxon, yang diwarnai oleh penerapan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam bentuk penegakan prinsip pasar bebas dan minimalisasi peran negara. Dalam wawancara dengan majalah Time, ekonom peraih nobel Joseph Stiglitz menyebut 'kapitalisme ala China' sebagai kisah keberhasilan penerapan model state capitalism, yang akan banyak ditiru setelah kegagalan model kapitalisme Anglo-Saxon ala AS. 'Model kapitalisme China' ditandai oleh kebijakan untuk mendorong kewirausahaan swasta dan mengundang investasi asing, dengan peran sentral negara dalam mengontrol arah pembangunan dan mengendalikan industri kunci (*key industries*) seperti perminyakan dan otomotif. Para pengamat umumnya melihat ini sebagai simbol kisah sukses 'kebangkitan China' (*the Rising China*) dalam hubungan internasional (Xinhua 2012 dalam chinadaily.com.cn 2012).

Kemudian, ekonomi AS kini juga makin bergantung pada China yang merupakan pembeli terbesar dari surat-surat berharga yang dikeluarkan AS. Belum lama ini bank sentral China mengumumkan pada Maret 2009 China mengalami peningkatan cadangan devisa 16% dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi US\$1,95 triliun. Hampir separuh dari cadangan devisa ini diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga dari Pemerintah AS dan beberapa negara lain. Artinya, AS sangat membutuhkan dana besar yang dimiliki oleh China untuk membiayai defisit neraca pembayarannya yang terus membengkak. China telah membeli sejumlah besar surat berharga yang dikeluarkan IMF untuk memperbesar dana organisasi keuangan internasional yang selama ini praktis dikendalikan oleh Pemerintah AS itu.

ASEAN Sebagai Free rider Diuntungkan Dalam Krisis Finansial Global

Tujuan utama pengembangan pasar modal ASEAN adalah untuk memperdalam pasar finansial (*deepening of financial markets*) dan pencapaian kolaborasi lintas batas pasar modal di antara negara-negara anggota ASEAN (EPV-EHU tt dalam ehue.es diakses pada 12 Desember 2012). Untuk memfasilitasi upaya pencapaian tujuan tersebut, telah dibentuk *Working Committee on Capital Market Development* (WC

CMD) yang saat ini diketuai oleh Singapura. Perkembangan pasar modal di ASEAN tak luput dari tekanan krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009. Berdasarkan data dari *Asian Development Bank* (ADB), proporsi sumber pembiayaan domestik dari penerbitan obligasi di negara-negara ASEAN-5 meningkat menjadi sekitar 33% pada tahun 2008 dari sebesar sekitar 9% pada tahun 1995. Pada sisi lain, sampai dengan kuartal ketiga 2009, *total outstanding bond* mencapai US\$667 milyar yang mana 70,4% adalah obligasi pemerintah dan 29,6% merupakan obligasi swasta. Perkembangan ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya diversifikasi atas sumber-sumber pembiayaan (Briand *et al.* t.t. dalam who.int 2012).

Bertolak dari krisis Finansial global tahun 2008, negara-negara ASEAN+3 (ASEAN plus Jepang, China, dan Korea Selatan) menyepakati sebuah inisiatif yang disebut dengan *Asian Bond Markets Initiative* (ABMI). Tujuan ABMI antara lain untuk mengembangkan pasar obligasi yang efisien dan likuid. Dalam upaya pengembangan pasar obligasi tersebut, ditemukan fakta bahwa perkembangan obligasi korporasi tidak secepat obligasi pemerintah karena *issuer* dengan *rating* di bawah *investment grade* mempunyai akses pasar yang terbatas, dan tidak terdapat institusi lokal yang berperan sebagai penjamin (*guarantor*).

Berangkat dari kenyataan tersebut, para Menteri Keuangan ASEAN+3 menyepakati pembentukan *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) yang ditujukan untuk memberikan jaminan bagi obligasi swasta dengan *rating investment grade* agar mempunyai akses pasar yang lebih luas. CGIF akan menjadi sebuah *Trustee* di bawah *Asian Development Bank* (ADB) yang mana *Trustee* tersebut akan tunduk kepada Kebijakan Operasional ADB yang relevan. Modal CGIF diperoleh dari kontribusi negara-negara ASEAN+3 dan ADB. Untuk memberikan dasar hukum bagi operasionalisasi CGIF, negara-negara ASEAN+3 intensif membicarakan CGIF *Articles of Agreement* (AoA) dan *Operational Policies* (OP). Terkait AoA, *draft article* yang diajukan oleh ADB sebagian besar dapat disepakati oleh ASEAN+3. Sebagaimana telah disepakati, tujuan awal pembentukan CGIF adalah untuk mengembangkan obligasi swasta bermata uang lokal.

Kesimpulan

Penelitian dan penulisan mengenai eksplanasi, serta tema ini dapat dikatakan telah berhasil karena penelitian ini telah menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan penulis. Ketidak efektifan G-20 dalam penanganan krisis finansial 2008 disebabkan *pertama*, Dengan pendekatan dominasi rezim internasional dalam hal ini AS sebagai negara hegemon sedang dalam masa krisis sehingga negara tersebut tidak bisa menyangga secara penuh agenda yang dilakukan oleh G-20, kemudian tidak ada rezim finansial yang bertanggung jawab sehingga G-20 mengalami banyak kendala dalam mensinkronisasi sistem finansial global. Ketiadaan instrument dalam menjalankan financial stability board menyisahkan persoalan tersendiri dalam penanganan krisis finansial, serta munculnya kekuatan baru dalam hal ini china sebagai penyeimbang dominasi AS dalam perekonomian sehingga untuk mengatur sistem keuangan internasional menjadi sangat sulit.

Kedua, ketidakefektifan G-20 dalam menyelesaikan krisis finansial 2008 juga banyak dipengaruhi oleh negara *Emerging market*, Negara *Emerging market* diuntungkan dengan adanya krisis finansial dinegara maju karena arus modal bergerak ke negara yang masih konsen dalam bidang industri manufacture. Sehingga dampak yang dirasakan oleh negara *Emerging market* sangatlah signifikan mulai pada peningkatan GDP sampai pada ekspansi produk ke negara lain. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kapital ADB 200% dan penambahan pendanaan dari Bank Pembangunan Multilateral dan Regional (*Multilateral/Regional Development Bank*) sebesar US\$300 miliar serta pembiayaan perdagangan (*trade financing*) sebesar US\$ 250 miliar untuk aliran modal ke negara berkembang.

Ketiga, kehadiran *free rider* juga menjadi persoalan baru, banyak negara anggota G-20 yang memanfaatkan kondisi krisis tersebut. Kesepakatan yang dibuat oleh negara anggota G-20 dalam penyelesaian krisis finansial 2008 dikatakan tidak efektif karena kesepakatan tersebut hanya pada level komitmen tidak pada tataran aplikatif, tidak ada kontrol yang memadai pasca komitmen itu terbentuk sehingga negara anggota G-20 lebih memilih kembali pada kepentingan nasionalnya.

Saran

Untuk penelitian lanjut mengenai permasalahan penanganan krisis finansial oleh kerja sama G-20, dapat dilakukan dengan menggambarkan keadaan dan dinamika ekonomi-politik internasional terkini di mana program kerja sama G-20 terlihat belum meredakan ketidakstabilan pasar di kawasan Eropa, terutama dengan adanya kasus *default* otoritas Yunani yang kemudian menggunakan fasilitas pinjaman IMF, serta peneliti menekankan pada ketidak efektifan G-20 dalam penanganan krisis Yunani akibat ada otoritas negara dan otoritas regional.

Secara spesifik peneliti mengharapkan ada peneliti lanjutan yang khusus pada penelitian tentang rezim finansial, karena menurut peneliti rezim finansial internasional belum ada sehingga harapannya ketiga ada yang meneliti rezim finansial internasional, akan memberi manfaat, khususnya pada negara anggota G20, mampu mengisi celah tersebut sehingga krisis yang diakibatkan oleh tidak terkontrolnya sistem keuangan dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

Buku

- Alcorta, Ludovico dan Frederick Nixon, 2011. "The Global Financial Crisis and the Developing World: Impact on and Implications for the Manufacturing Sector", *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Working Paper* 06 / 2010.
- Bagwell, Kyle, and Robert W. Staiger, 2001. "The WTO as a Mechanism for Securing Market Access Property Rights: Implications for Global Labor and Environmental Issues", *Journal of Economic Perspectives*, summer, 2001.
- Brooks, Stephen G. dan William C. Wohlforth, 2005. "*Keunggulan Amerika dalam Tinjauan*", dalam *Amerika dan Dunia, Memperdebatkan Bentuk Baru dalam Politik Internasional*, Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia.

- Charles Lipson and Benjamin J. Cohen, 1999. *Theory and structure in international political economy*. MIT Press, hal.201.
- Frank J. Lechner dan John Boli (eds.), 2000. *The Globalization, Reader*. Massachusetts, MA dan Oxford: Blackwell.
- Franck, Thomas M, 2003 *The Power of Legitimacy Among Nations* (New York: Oxford University Press).
- Frost, Ellen L., 2009. What Is Economic Power? In *The Global Redistribution of Economic Power*. JFQ / issue 53, 2nd quarter.
- Haggard, Stephan and Simmons, B.A, 1987. "Theories of International Regimes." *International Organization* 41, 3, pdf copy (World Peace Foundation and The Massachusetts Institute of Technology, Summer 1987).
- Hoekman, Bernard and Michel Kostecki, 1995. *The Political Economy of the World Trading System*, Oxford University Press, Oxford UK.
- Jacques B. Gelin, 2003. *Juggernaut Politics*, London: Zed Books, terutama bab III – "The Masters of the Globalized World".
- Jervis, Robert, 2007. *Realism, Game Theory, and cooperation*. *World Politics* 40 (3) hal 317-349 Published by: Cambridge University Press Stable URL.
- Joseph E. Stiglitz, 2010. *The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis*, New York: New Press.
- Karns, Margaret P. and Mingst, Karen A., 2004. *International Organizations: the Politics and Processes of Global Governance*. London: Lynne Rienner.
- Keohane, Robert O. and Lisa L. Martin, 1995. "The Promise of Institutional Theory." *International Security* 20/1(Summer).
- Krasner, Stephen D, 1982. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Organization* 36/2 (Spring). Reprinted in Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Martin Wolf, 2008. *Fixing Global Finance (Forum on Constructive Capitalism)* (paperback), Maryland: The Johns Hopkins University Press, hlm. 3-4.
- Oran R. Young, 1980. *World Politics, International Regimes: Problems of Concept Formation* Source: Vol. 32, No. 3 pp.331-356 Published by: Cambridge University Press Stable URL.
- Patrick, Stewart, 2010. *The G20 and the United States: Opportunities for More Effective Multilateralism*. New York: The Century Foundation.
- Pinter dan Jan Art Scholte, 2000. *Globalization: A Critical Introduction*. New York: St. Martin's Press.
- Saw, Swee-Hock, 2011. "Managing Economic Crisis in Southeast Asia". Kumpulan paper yang disajikan pada Conference on Managing Economic Crisis in Southeast Asia, 29 Januari 2010 di Singapura. Institute of Southeast Asian Studies, 2011.

Artikel Online

- Batra, Ashwani, 2007. Kejatuhan Wall Street [online]. dalam <http://www.planmanconsulting.com/gsic/doc/collateral-debt-obligations.pdf> [diakses tgl 23/12/2012]

- BI, t.t. Analisis krisis amerika dan relevansi G-20. [online]. dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BD90A840-F829-45C2-B709>
- Briand, Sylvie, Anthony Mounts dan Mary Chamberland, t.t. *Global Surveillance*. [online]. dalam http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/Challenges_global_surveillance.pdf diakses tgl 23/12/2012
- Brown, Gordon, t.t. Kinerja anggota G-20 terdapat di <http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/03/G-20-gordon-brown-global-economy> [diakses pada tanggal 11 Oktober 2012].
- EPV-EHU, t.t. *ASEAN Vision 2020 dipercepat implementasinya 5 tahun lebih awal melalui ASEAN Economic Community Blueprint 2015 (AEC)*. [online]. dalam <http://www.ehu.es/ceinik/tratados/9TRATADOSSOBREINTEGRACIONYCOOPERACIONENASIA/91ASEAN/IC9114.pdf> [diakses pada 12 Desember 2012].
- Gereffi, Gary dan Karina Fernadez-Stark, 2011. *Analisis Internasional*. [online]. dalam http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVC_analysis_a_primer.pdf [diakses pada 23 Desember 2012].
- Hadi, Didik Kurniawan, t.t. *UGM dampak krisis keuangan global*. [online]. dalam http://didik2h.web.ugm.ac.id/upload/Dampak_Krisis_Kuangan_Global.pdf [diakses tanggal 16 oktober 2012].
- IMF, t.t. *World Economic Outlook Dan Pengaruh Negara Emerging Market Pada Pertumbuhan Internasional*. [online]. dalam <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/01/index.htm> [diakses 23 November 2012].
- Pearson Education Canada, 2005. *Globalisasi dan Transnational Corporation*. [online]. dalam http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/1308/1340281/ragan_econ_11ce_Ch07_topic.pdf. [diakses 23 November 2012].
- Summit London, t.t. [online]. dalam <http://www.Londonsummit.gov.uk/en/summit-communique> diakses pada tanggal 23/11/2012. [diakses pada 23 Desember 2012].
- Summit Pittsburgh, t.t. [online]. dalam <http://www.G-20pittsburghsummit.org/>. [diakses pada 23 Desember 2012].
- _____, t.t. [online]. dalam <http://www.pittsburghsummit.gov.uk/en/summit-communique> [diakses pada 23 November 2012].
- Xinhua, 2012. *Kemunculan China sebagai Kekuatan Baru*. [online]. dalam http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/201211/15/content_15931817.htm [diakses pada 23 Desember 2012].
- _____, t.t. *Laju Pertumbuhan Internasional*. [online]. dalam <http://harryazharazis.com/pdf/1171/.cnet>. [diakses pada 23 November 2012].

